

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perkebunan didalam perekonomian di Indonesia memiliki peranan yang cukup strategis, antara lain sebagai penyerapan tenaga kerja, pengadaan bahan baku untuk industri terutama industri manufaktur, penyedia pangan untuk konsumsi masyarakat, dan sebagai penyumbang yang cukup besar untuk pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia, yang dapat dilihat dari kontribusi subsektor perkebunan pada tahun 2013 mencapai US\$ 45,54 milyar atau setara dengan Rp.546,42 triliun (asumsi 1 US\$ = Rp. 12.000,-). Jika dibandingkan dengan tahun 2012 kontribusi subsektor perkebunan mengalami peningkatan sebesar 27,78% atau naik sebesar US\$ 9,90 milyar (Dirjenbun, 2014; iii).

Di Indonesia terdapat banyak komoditi unggulan pada sektor perkebunan, yakni komoditi kelapa sawit, teh, karet, kakao, dan kelapa. Komoditi kelapa adalah salah satu komoditi perkebunan yang cukup besar yang diusahakan di Indonesia. Pertanaman kelapa di Indonesia merupakan yang terluas di dunia dengan pangsa 31,2% dari total luas areal kelapa dunia. Peringkat kedua diduduki Filipina (pangsa 25,8%), disusul India (pangsa 16,0%), Sri Lanka (pangsa 3,7%), dan Thailand (pangsa 3,1%). Namun demikian, dari segi produksi ternyata Indonesia hanya menduduki posisi ke dua setelah Philipina. Ragam produk dan devisa yang dihasilkan Indonesia juga di bawah India dan Sri Lanka. Perolehan devisa dari produk kelapa mencapai 229 juta US\$ atau 11% dari ekspor produk kelapa dunia pada tahun 2003 (DPPMD Kaltim, 2009; 1)

Tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna, hampir seluruh bagian kelapa mulai dari akar hingga daun kelapa dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan pangan maupun non pangan. Oleh karena itu, kelapa sering dijuluki sebagai *The Tree of Life* (pohon kehidupan), karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Pohon ini dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dari pulau Sumatera hingga Papua (Rukmana, 2016;1).

Sentra produksi kelapa di Indonesia adalah Propinsi Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Luas lahan

kelapa di Indonesia tahun 2013 mencapai 3.654.478 hektar, yang terdiri dari perkebunan rakyat (PR) seluas 3.614.672 hektar, perkebunan milik pemerintah seluas 4.079 hektar, serta milik swasta seluas 35.726 hektar (Dirjenbun, 2014; 3).

Lahan perkebunan kelapa yang paling luas adalah lahan perkebunan rakyat . Namun kondisi perkebunan rakyat memiliki kondisi yang berbeda dengan perkebunan yang dimiliki oleh pihak swasta maupun pemerintah. Perkebunan kelapa milik rakyat sebagian besar memiliki masalah terkait pemeliharaan yang seadanya atau tidak sama sekali, dan tidak berada pada skala komersial karena hanya dikelola secara tradisional (Pakasi, 2013;251).

Di Wilayah Sumatera, Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki luas lahan kelapa terbesar kelima dengan total areal lahan perkebunan kelapa mencapai 87.528 (Lampiran 1). Daerah sentra produksi kelapa terbesar di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Padang Pariaman, hal ini terlihat dari total produksi kelapa di Kabupaten Padang Pariaman yang lebih besar dibandingkan dari daerah-daerah lain di Sumatera Barat, produksi kelapa di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 mencapai 34.111 ton (Lampiran 2).

Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Barat pada tahun 2015-2016 produksi kelapa di Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan (Lampiran 2). Penurunan produksi kelapa terjadi pada tahun 2009, pasca gempa bumi yang melanda Sumatera Barat, hal ini berdampak pada penurunan produksi kelapa pada tahun 2010 (Lampiran 2). Pada tahun 2011 hingga 2015 produksi sudah berangsur-angsur meningkat kembali. Namun, hingga saat ini masih banyak kendala yang dialami dalam peningkatan produktivitas kelapa di Kabupaten Padang Pariaman, mulai dari luas lahan, efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, sistem modal, serta pengaturan tataniaga dan insentif usaha (Winardi,dkk. 2015;123)

Hampir seluruh usahatani kelapa di Sumatera Barat diusahakan oleh masyarakat. Kebun biasanya tidak dilakukan perawatan/pemeliharaan, seperti: pemagaran, penyiangan, pengolahan tanah, pemupukan, pemberantasan hama penyakit dan lain-lain. Luas lahan yang ditanami kelapa pun tidak menentu, lahan yang ditanami kelapa biasanya terdapat di sekitar rumah atau lahan yang letaknya

agak berjauhan dari tempat tinggal, sehingga sulit untuk mengumpulkan kelapa dan biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk mengangkut kelapa dari kebun ke tempat pengumpulan, hal ini tentunya akan mempengaruhi tataniaga kelapa tersebut (Winardi,dkk. 2015; 122).

Tataniaga merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat pendapatan petani dari semua penjualan produksi usahataniannya. Tata niaga atau pemasaran pada prinsipnya adalah aliran barang dari produsen ke konsumen. Aliran barang ini dapat terjadi karena adanya lembaga pemasaran (Soekartawi, 2002; 69).

Pemasaran produk agraris, termasuk perkebunan, cenderung merupakan proses yang agak kompleks, sehingga saluran distribusi lebih panjang dan mencakup lebih banyak perantara. Ada beberapa ciri produksi pertanian yang mempengaruhi pemasaran hasil pertanian: pertama, produksi dilakukan secara kecil-kecilan. Kedua, produksi terpecah. Ketiga, produksi musiman, menyebabkan kesulitan dalam tataniaga, yang mengharuskan adanya fasilitas-fasilitas penyimpanan yang sudah pasti menyebabkan bertambahnya biaya tata niaga (Soekartawi, 2002; 13)

Salah satu aspek penting dalam tataniaga adalah terbuka atau tersedianya informasi pasar dan akses tataniaga yang baik dari petani hingga sampai ke tangan konsumen. Produk pertanian mengharuskan adanya penanganan khusus yang baik agar dapat sampai ditangan konsumen dengan baik. Hal ini dikarenakan sifat dari hasil pertanian yang cenderung rawan terhadap kerusakan, ukuran yang besar, mutu yang beraneka ragam dan tidak tahan lama, maka dari itu diperlukan peran lembaga tataniaga pertanian dalam menyalurkan produk hingga sampai ketangan konsumen (Soekartawi, 2002;111).

Menurut Soekartawi, 2002;36. Tataniaga adalah aliran barang dari produsen ke konsumen akhir. Didalam aliran barang terdapat peranan lembaga tataniaga yang sangat tergantung dari sistem pasar yang berlaku dan karakteristik aliran barang yang dipasarkan. Dalam pengaliran barang tersebut sering dikenal dengan istilah Saluran Tataniaga. Fungsi saluran tataniaga adalah untuk melihat tingkat harga dimasing-masing lembaga tataniaga. Fungsi tataniaga yang dilakukan oleh masing-masing lembaga-lembaga tataniaga, bertujuan untuk memberikan

kepuasan kepada konsumen. Selain itu tujuan dari fungsi tataniaga yaitu untuk meningkatkan pendapatan petani, bukan untuk merugikan petani.

Keuntungan pemasaran merupakan selisih antara harga yang dibayarkan ke produsen dan harga yang dibayarkan konsumen akhir atau disebut pula margin pemasaran. Perbedaan jarak dari produsen ke konsumen menyebabkan terjadinya perbedaan besarnya keuntungan. Oleh karena produsen tidak dapat bekerja sendiri untuk memasarkan produknya sehingga memerlukan pihak lain atau lembaga pemasaran untuk membantu memasarkan hasil produksinya (Rahim dan Hastuti, 2007:121).

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang mata pencaharian masyarakatnya berasal dari kegiatan pertanian, salah satunya pada sektor perkebunan. Dalam subsektor tanaman perkebunan terdapat usahatani berupa tanaman kelapa. Salah satu tanaman perkebunan yang cukup banyak dihasilkan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu tanaman kelapa .

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2015, Kelapa merupakan komoditi dengan lahan terluas di Kabupaten Padang Pariaman, sebagai komoditi tanaman khas daerah Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki luas areal seluas 11.436 Ha dengan tingkat produksi mencapai 40.786 ton. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari tujuh belas kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan V Koto Timur yang merupakan salah satu kecamatan yang menghasilkan kelapa cukup besar dengan lahan mencapai 2.020 Ha dengan tingkat produksi sebesar 1.764 ton (Lampiran 3).

Nagari Limau Puruik merupakan salah satu nagari yang memiliki produksi kelapa cukup tinggi yang berada di Kecamatan V Koto Timur, dengan luas lahan kelapa 500 Ha dengan tingkat produksi mencapai 455 ton per tahun (lampiran 4). Areal perkebunan kelapa di wilayah ini berada di kawasan hutan, dengan jarak kebun kelapa dengan akses jalan raya yang cukup jauh, untuk mengumpulkan kelapa yang berada di titik-titik panen yang berjauhan di dalam hutan pun diperlukan waktu banyak dan biaya yang cukup besar.

Pemasaran kelapa dari Nagari Limau Puruik dilakukan ke Kota Padang, Kota Pariaman dan sebagian ke Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. pemasaran kelapa tersebut melibatkan banyak pedagang perantara, antara lain pedagang pengumpul tingkat nagari, pedagang antar daerah, dan pedagang pengecer.

Berdasarkan hasil wawancara pada survei pendahuluan didapat informasi bahwa sebagian petani kelapa menjual kelapa ke pedagang pengumpul nagari dengan harga Rp 1.500- Rp 2.100/buah, sebagian petani menjual kelapa langsung ke pedagang antar daerah dengan harga Rp 3.100- Rp 3.500. Sedangkan pada tingkat pedagang pengumpul nagari menjual kembali ke pedagang antar daerah dengan harga Rp 3.266,67/buah tergantung ukuran dan kualitas, dan harga kelapa ditingkat konsumen mencapai Rp 3.800-Rp 6.000/butir, dari informasi tersebut terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen.

Perbedaan harga kelapa yang diterima petani dan pedagang yang cukup besar, menunjukkan terdapatnya permasalahan pada tataniaga kelapa. Implikasi yang terjadi pada permasalahan tataniaga ini membuat pendapatan yang diterima petani sebagai produsen menurun dari yang seharusnya. Untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, maka diperlukan adanya sistem pemasaran yang efisien yang mampu mengadakan pembagian keuntungan yang adil kepada semua pihak baik produsen maupun lembaga pemasaran. Panjang pendeknya saluran pemasaran dapat menyebabkan adanya selisih harga ditingkat konsumen dengan harga yang diterima petani. Harga yang tinggi ditingkat konsumen belum tentu memberikan keuntungan yang tinggi bagi petani atau produsen kelapa. Petani sebagai produsen hanya bertindak sebagai *price taker* yang memperoleh bagian yang kecil dari harga yang dibayarkan oleh konsumen.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka peneliti perlu melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Tataniaga Kelapa di Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman”**.

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana saluran tataniaga dan fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tataniaga kelapa di Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman ?

2. Berapa besar margin tataniaga, biaya dan keuntungan yang diterima pada petani dan lembaga-lembaga tataniaga kelapa, serta efisiensi tataniaga kelapa di Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas,maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan saluran tataniaga dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tataniaga kelapa di Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.
2. Menganalisis margin tataniaga, biaya dan keuntungan yang diterima pada petani dan lembaga-lembaga tataniaga kelapa serta efisiensi tataniaga kelapa di Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait diantaranya :

1. Bagi petani diharapkan dapat memberikan informasi untuk memilih saluran tataniaga yang tepat dalam menjual kelapa
2. Bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membuat kebijakan terkait tataniaga komoditi perkebunan terutama komoditi kelapa.
3. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap pengembangan tataniaga khususnya tataniaga kelapa.